

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK CINTA (LOVE SCAM) PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SUMATERA BARAT

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas*

Oleh:

MENTARI ALZA SYAFIRA

22101111015

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Efren Nova, S.H., M.H.

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 03/PK-IV/IV/2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK CINTA (*LOVE SCAM*) PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SUMATERA BARAT

(Mentari Alza Syafira, 2210111015, Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 79 Halaman, Tahun 2026)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok cinta (*love scam*) merupakan bagian dari penerapan hukum pidana secara konkret dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin berkembang. Tindak pidana ini dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan hubungan emosional korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sehingga penanganannya berada dalam kerangka Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat; (2) apa saja kendala yang dihadapi; dan (3) upaya apa yang dilakukan dalam mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data primer berupa wawancara dengan penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dan korban, serta data sekunder dari bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahap penyidikan telah dilaksanakan secara prosedural sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum optimal sebagaimana tercermin dari belum adanya perkara yang mencapai tahap penuntutan. Kendala yang dihadapi meliputi penggunaan identitas palsu oleh pelaku, lokasi pelaku yang berada di luar wilayah hukum, keterbatasan akses data keuangan, keterbatasan sarana digital forensik, kurangnya personel berkeahlian siber, serta rendahnya kepercayaan korban terhadap proses hukum. Adapun upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi penelusuran digital, koordinasi dengan Dirlitidsiber Mabes Polri dan instansi terkait, peningkatan kapasitas penyidik, serta edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: penegakan hukum, *love scam*, penyidikan, kejahatan siber

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF FRAUD
DISGUISED AS ROMANCE (LOVE SCAM) AT THE
INVESTIGATION STAGE IN THE WEST SUMATRA REGIONAL
POLICE**

(Mentari Alza Syafira, 2210111015, Criminal Law, Faculty of Law,
Andalas University, 79 Pages, Year 2026)

ABSTRACT

Law enforcement against love scam crimes constitutes part of the concrete application of criminal law in addressing the growing threat of cybercrime. Such crimes are committed through electronic media by exploiting the victim's emotional attachment to obtain illicit gains, and their handling falls under the framework of Article 492 of the National Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions. The research questions addressed in this study are: (1) how is law enforcement regarding love scam crimes conducted during the investigation stage at the West Sumatra Regional Police; (2) what obstacles are encountered; and (3) what efforts have been made to overcome them. The research method employed is juridical-empirical, with primary data obtained through interviews with investigators from Sub-Directorate V (Cybercrime) of the Special Crimes Investigation Directorate at the West Sumatra Regional Police and victims, as well as secondary data from relevant legal materials.

The findings indicate that law enforcement at the investigation stage has been carried out procedurally in accordance with applicable regulations, yet has not yielded optimal results, as evidenced by the absence of any case reaching the prosecution stage. Obstacles encountered include the use of false identities by perpetrators, perpetrators located outside the jurisdiction or abroad, limited access to financial data, insufficient digital forensic equipment, a shortage of personnel with specialized cybercrime expertise, and low victim confidence in the legal process. Efforts undertaken include optimizing digital tracing, coordinating with the Cybercrime Directorate at National Police Headquarters and relevant agencies, enhancing investigators' capacity through training, and conducting public education and outreach.

Keywords: law enforcement, love scams, investigation, cybercrime